

BAB I

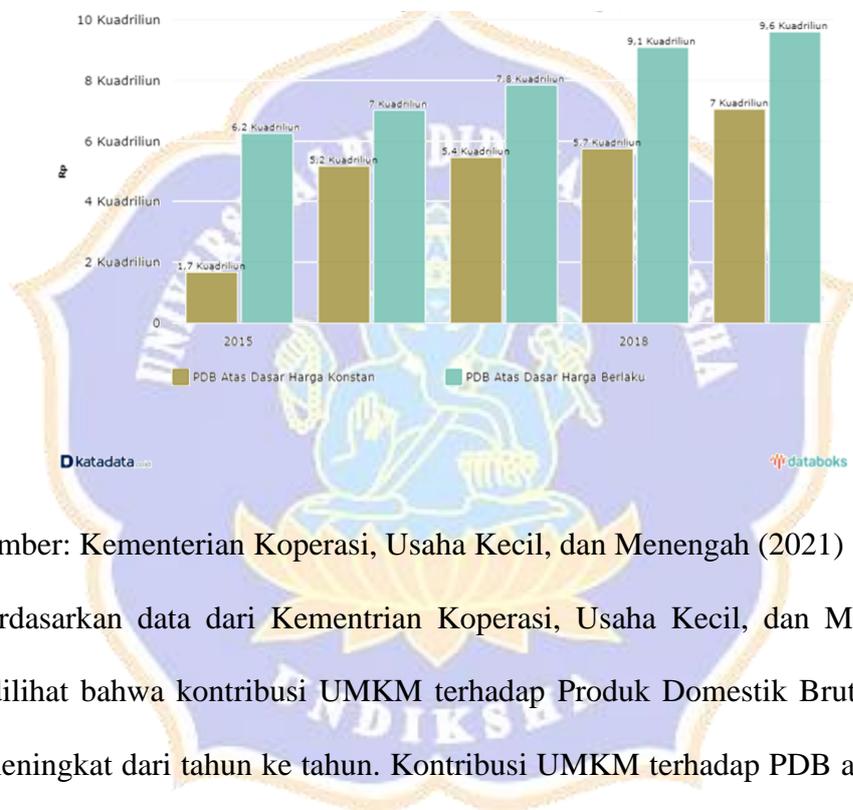
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern ini, sebagian besar masyarakat memulai wirausaha dengan membangun usaha mikro kecil menengah (UMKM). Di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting bagi laju perekonomian yang mana sebagai salah satu cara untuk percepatan pembangunan daerah. Merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, usaha mikro kecil dan menengah adalah sektor yang mengambil peran cukup besar dalam menyediakan lapangan kerja. Selain itu, UMKM juga memiliki kemampuan bertahan yang cukup tinggi bagi keadaan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) setelah kejadian krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998, banyaknya jumlah UMKM tidak mengalami penurunan malah semakin mengalami peningkatan hingga saat ini. Kementerian Koperasi dan UKM RI mengatakan apabila dilihat dari jumlah unitnya, UMKM mempunyai pangsa pasar sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari semua jumlah total usaha yang ada di Indonesia, akan tetapi usaha besar hanya mampu berkontribusi sebanyak 0,01% atau sekitar 5.400 unit. Sedangkan usaha mikro mampu menyerap tenaga kerja sekitar 107,2 juta atau (89,2%), dan usaha kecil 5,7 juta atau 4,74%, serta untuk usaha menengah sekitar 3,73 atau 3,11% sedangkan usaha besar hanya mampu menyerap sekitar 3,58 juta jiwa yang berarti bahwa secara keseluruhan UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, dibandingkan dengan usaha besar yang hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 3% dari total keseluruhan. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi

mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor lainnya. UMKM juga memiliki peran yang besar terhadap daya serap tenaga kerja serta berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Dari sudut pandang Produk Domestik Bruto (PDB), sumbangan UMKM juga menjanjikan.

Gambar 1.1
Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia Tahun 2015 - 2019



Sumber: Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (2021)

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dapat dilihat bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp 9.580,8 triliun. Kontribusi ini naik 5,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 9.062,6 triliun. Besarnya kontribusi UMKM ini dikarenakan UMKM merupakan mayoritas penyumbang dari unit usaha di Indonesia. Sebanyak 64,2 juta atau 99,99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Bila dibandingkan dengan Usaha Besar (UB), hanya sebesar 5,5 ribu atau 0,01% dari total unit usaha di Indonesia.

Besarnya potensi yang dimiliki UMKM terhadap perekonomian negara tidak dapat memungkiri bahwa fakta di lapangan menyatakan UMKM masih memiliki banyak masalah yang dihadapi seiring perkembangannya. Manajemen bisnis merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh UMKM. Dalam perkembangannya, UMKM dapat dikatakan lambat, dimana hal ini disebabkan oleh berbagai masalah konvensional yang bertumpuk karena tidak diselesaikan secara tuntas seperti masalah terkait SDM (Sumber Daya Manusia), pemasaran, pembiayaan, kepemilikan, dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan UMKM itu sendiri. Oleh sebab itu, UMKM memerlukan upaya yang esensial terkait peningkatan kinerja UMKM. (Suryandani, 2019)

Bali merupakan wilayah di Indonesia yang pariwisatanya telah dikenal oleh kalangan masyarakat di seluruh dunia. Selain pariwisata, kentalnya adat istiadat serta besarnya potensi alam yang dimiliki pulau Bali menjadikan masyarakat Bali melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan mendirikan UMKM. UMKM di Bali merupakan industri yang masih tetap eksis karena kegiatan bidang ini tidak terpengaruh dengan adanya krisis. Bertambahnya unit-unit usaha kecil dan menengah tidak terlepas dari peran kewirausahaan pelaku UMKM. Pengalaman di negara-negara maju menunjukkan bahwa UMKM adalah sumber dari inovasi produksi dan teknologi, pertumbuhan jumlah wirausahawan yang kreatif dan inovatif dan penciptaan tenaga kerja terampil dan fleksibel dalam proses produksi untuk menghadapi perubahan permintaan pasar yang cepat (Sari, 2014, hal. 2). Berikut perkembangan jumlah data UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2017-2021.

**Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2017-2021**

No	Kabupaten /Kota	Tahun					Pertumb uhan 2017- 2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jembrana	10.525	27.654	24.346	46.277	66.537	53%
2	Tabanan	39.980	41.459	42.744	43.715	47.160	18%
3	Badung	17.754	19.688	19.261	22.647	40.909	13%
4	Gianyar	91.511	75.412	75.482	75.542	75.620	-17%
5	Klungkung	9.712	11.761	14.584	35.792	36.072	27%
6	Bangli	43.948	44.068	44.068	44.123	44.175	0,5%
7	Karangasem	38.954	39.551	40.468	57.456	40.614	4%
8	Buleleng	31.563	34.552	35.555	54.489	57.216	81%
9	Denpasar	30.840	31.826	32.026	32.224	32.226	4%
		313.787	325.971	327.353	412.265	440.609	

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali (Data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas, UMKM menurut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali telah mencatat sejak tahun 2017-2021 jumlah UMKM mengalami peningkatan lebih dari 260.000 unit. Hal ini telah membuktikan bahwa keberadaan UMKM sangat berpengaruh besar pada roda perekonomian nasional. Melihat data yang disajikan oleh Dinas Koperasi dan UKM dapat diinterpretasikan bahwa secara umum UMKM dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan

perekonomian Provinsi Bali. Berdasarkan tersebut juga dapat dicermati bahwa pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng menempati posisi pertama dengan hasil 81%. Hal ini berarti tingkat pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng paling besar jumlahnya dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali. Selain itu juga didukung oleh bukti bahwa Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara kabupaten lainnya, yaitu mencapai 827.642 jiwa (www.katadata.com) dan memiliki wilayah terluas di Provinsi Bali sebesar 1.322,75 km² (Bulelengkab.go.id, 2019). Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mengungkapkan bahwa adanya indikasi peningkatan serta tingginya jumlah UMKM yang mengalami perkembangan usaha. Berikut merupakan data UMKM di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM dan Usaha Besar di Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022

No	Klasifikasi Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Usaha Mikro	25.202	26.048	44.670	47.311	55.173
2.	Usaha Kecil	9.140	9.294	9.576	9.654	10.827
3.	Usaha Menengah	193	196	226	234	351
4.	Usaha Besar	17	17	17	17	17
	Total	34.552	35.555	54.489	57.216	66.368

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (2023)

Berdasarkan data saat observasi di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (2020), bahwa UMKM mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya, dimana dari tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat sebesar 1003 unit dan mengalami lonjakan pada tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 18.934 unit. Berikut data mengenai jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng per masing-masing Kecamatan periode 2020-2021.

Tabel 1. 2 Data Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Gerokgak	4.619	4.710	4.994	5.286	5.466
2.	Seririt	4.190	4.461	4.502	4.502	4.578
3.	Busungbiu	3.687	3.755	3.810	3.853	3.938
4.	Banjar	3.490	3.578	3.612	3.649	3.739
5.	Sukasada	2.941	3.014	3.073	3.110	3.210
6.	Buleleng	6.600	6.836	6.951	7.020	7.397
7.	Sawan	3.128	3.158	3.241	3.268	3.378
8.	Kubutambahan	2.765	2.823	2.847	2.866	2.991
9.	Tejakula	3.132	3.220	3.320	3.420	3.550

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Buleleng (2023)

Data di atas memaparkan jumlah UMKM yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2022 Kecamatan Buleleng merupakan kecamatan yang memiliki jumlah UMKM terbesar di Kabupaten Buleleng dengan jumlah

UMKM sebesar 7.397 unit dan penyebaran terkecil terletak di Kecamatan Kubutambahan. Tingginya angka perkembangan UMKM di Kecamatan Buleleng dikarenakan Kecamatan Buleleng merupakan pusat dari Kabupaten Buleleng (Uma et al., 2017). Hal ini berarti segala kegiatan maupun aktivitas usaha dengan berbagai macam bidang berkembang lebih banyak di Kecamatan Buleleng. Pemaparan diatas merupakan alasan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Buleleng.

Pada kenyataannya, peningkatan angka pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng tidak diimbangi dengan kinerjanya. Sehingga menimbulkan masalah terkait kinerja UMKMnya. Berdasarkan hasil observasi awal menemukan fakta bahwa kinerja yang dimiliki UMKM di Kabupaten Buleleng tidak cukup baik. Hal ini tergambarkan melalui tidak adanya peningkatan yang dialami UMKM selama mengembangkan usahanya.

Tabel 1.4 Performa Kinerja UMKM di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Performa Kinerja Lebih Buruk	Persentase Performa Usaha
1.	Buleleng	5.231	20,79%
2.	Denpasar	4.308	17,12%
3.	Gianyar	4.249	16,88%
4.	Badung	3.594	14,28%
5.	Tabanan	2.511	9,98%
6.	Jembrana	2.370	9,42%
7.	Bangli	1.222	4,86%
8.	Karangasem	1.067	4,24%

9.	Klungkung	614	2,44%
Total		25.166	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah peneliti (2022)

Sebagian besar UMKM di Kabupaten Buleleng cenderung *stuck* dan hanya berdiam di tempat selama pelaksanaannya. Informasi ini mendasar pada data BPS Provinsi Bali pada tahun 2022 yang memaparkan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng menempati posisi teratas terkait performa usaha kurang baik. Performa usaha merupakan segala hal terkait peningkatan, penurunan, maupun konstan yang berhubungan dengan perkembangan usaha dari pelaku UMKM. Tingkat performa usaha diukur berdasarkan jumlah aset maupun laba usaha yang diperoleh UMKM dalam satu periode. Berada dalam posisi teratas berarti perkembangan usaha dari pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan, atau hanya berjalan di tempat. Di Kabupaten Buleleng sendiri dari 5.231 UMKM yang memiliki prospek usaha kurang baik yang paling banyak berada di Kecamatan Buleleng, Sebagian besar UMKM di Kecamatan Buleleng memiliki prospek usaha yang kurang baik dan memiliki jumlah UMKM yang sangat banyak pada tahun 2018 sebanyak 6.600 dibandingkan Kecamatan lain (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat kurangnya prospek kerja yang dimiliki oleh pelaku UMKM di kecamatan Buleleng. Hal ini dibuktikan karena kurangnya inovasi produk yang dimiliki. Contoh, pelaku UMKM cenderung mengikuti penjualan produk yang memiliki trend tinggi namun, tidak memperhatikan kuantitas dan kualitas barang yang dijual dan proses pemasaran yang dilakukan. Sehingga, bisnis yang dijalankan tidak berlangsung lama.

Permasalahan selanjutnya, pelaku UMKM kesulitan dalam mendapatkan pinjaman bank yang menyebabkan minimnya modal usaha yang dimiliki, hal tersebut juga merupakan penghambat dari prospek kerja. Hal ini berhubungan dengan literasi keuangan yang tergolong rendah, sehingga para UMKM kesulitan untuk memulai usaha baru. Kurangnya pemahaman pemasaran produk adalah hal yang patut diperhatikan dalam menjalankan UMKM, namun faktanya masih ditemukan pelaku UMKM di kecamatan Buleleng yang kurang memahami strategi pemasaran yang tepat dalam memasarkan produknya, hal ini juga terjadi karena kurangnya pemanfaatan media digital dalam memasarkan produk.

Kemampuan berkompetisi pada UMKM di masa sekarang ini bergantung pada 2 kondisi yakni, lingkungan internal serta eksternalnya. Lingkungan internal mencakup faktor faktor yang berasal dari dalam organisasi dan dikendalikan oleh pelaku usaha seperti sumber daya keuangan maupun sumber daya manusianya. Sumber daya manusia meliputi kualitas daripada tenaga kerja dalam suatu perusahaan yang melibatkan literasi keuangan yang dimiliki sumber daya manusia tersebut. Sementara sumber daya keuangan berhubungan dengan modal yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Selanjutnya lingkungan eksternal mencakup faktor yang berasal dari luar organisasi seperti pangsa pasar, konsumen serta stakeholders (Alberti, 2010). Keberhasilan UMKM dapat diukur berdasarkan kinerja UMKM dalam perhitungan satu periode.

Modal yang kurang memadai merupakan salah satu penyebab menghambat perkembangan UMKM di Kecamatan Buleleng, permasalahan modal memang sudah tidak asing lagi bagi pelaku usaha UMKM, karena Sebagian besar mengalami hambatan dalam mengembangkan usahanya bahkan ada beberapa pelaku usaha

harus mengalami bangkrut karena permasalahan modal itu sendiri (BaliPost, 2018). Pemberian kredit untuk UMKM oleh lembaga keuangan sangat membantu pengusaha UMKM untuk menjalankan usahanya.

Perkembangan UMKM di Indonesia mengharuskan para pelaku UMKM untuk bertahan dan siap dalam persaingan dengan UMKM lainnya. Hal ini memicu para pelaku UMKM agar menciptakan usaha-usaha yang baru dan berbeda, tentunya dengan kinerja yang baik. Kebanyakan pemilik UMKM tidak memiliki pandangan dan pengetahuan yang luas, sehingga kurang berorientasi jangka panjang. Upaya untuk meningkatkan kinerjanya cenderung bersifat konvensional karena kurangnya pengetahuan dalam bidang manajemen. Dalam penentuan harga produk sering hanya berorientasi pada kondisi umum di lingkungan industrinya dan tenaga kerja jarang diperhitungkan. Dengan demikian, mereka sering keliru dalam mengukur produktivitas usaha yang pada akhirnya bermuara pada kinerja usaha (Wirastuti et al., 2009) Namun perkembangan UMKM masih terhambat dengan sejumlah persoalan, yang ditinjau dari dua faktor. Pertama, faktor internal yaitu lemah pada segi permodalan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kedua, faktor eksternal berupa masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Beberapa masalah tersebut apabila tidak ditangani maka akan berdampak pada kinerja UMKM. Untuk menanggapi persoalan tersebut terutama dari segi permodalan dan pemasaran, terdapat satu model yang bernama Inklusi Keuangan (Irmawati, Damelia, & Puspita, 2013, hal. 153).

Akses permodalan merupakan hal yang paling sering menjadi penghambat bagi para pelaku usaha UMKM. Permasalahan akses pembiayaan merupakan permasalahan yang masih terjadi di pelaku usaha UMKM, padahal seperti yang

diketahui UMKM memiliki peran yang sangat besar dan kontribusi yang besar terhadap negara, dari hasil survey yang telah dilakukan oleh OJK sebanyak 70% dari total 60 juta UMKM memiliki masalah akan akses pembiayaan, ini disebabkan karena beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha seperti kendala administrasi dan kendala lainnya yang membuat pelaku usaha UMKM sulit mendapatkan akses pembiayaan (detikfinance.com, 2019). Sama seperti halnya di daerah lain, UMKM di Kecamatan Buleleng juga menghadapi masalah mengenai akses permodalan, modal yaitu sesuatu yang sangat berharga pelaku bisnis UMKM, dengan adanya modal usaha maka suatu usaha akan bisa berjalan dengan baik (Suardana, 2020)

Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan. Inklusi keuangan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh infrastruktur yang ada. Secara keseluruhan, program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat (Nurjannah, 2017, hal. 5).

Hambatan masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan adalah tingginya unbankable (tidak memenuhi persyaratan pinjaman bank). Hal tersebut terjadi karena banyak pelaku usaha UMKM di Kecamatan Buleleng tidak bisa memenuhi atau mengikuti syarat-syarat administrasi dan prosedur yang diminta oleh lembaga keuangan, sehingga banyak pelaku usaha UMKM tidak bisa mengakses modal untuk menjalankan usahanya dan Sebagian besar pelaku usaha UMKM

menggunakan modalnya sendiri. Riset oleh Purwaningsih (2015), menunjukkan bahwa akses permodalan memang sulit diakses oleh pelaku UMKM, yang akan menjadikan hambatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena lembaga formal seperti bank masih ragu untuk memberikan kredit pada pelaku usaha, selain itu alasan lembaga formal tidak memberikan pinjaman kepada pelaku usaha UMKM karena keuntungan yang diterima tidak sebanyak keuntungan dari pengusaha besar. Sehingga sulitnya akses permodalan bagi pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan pinjaman kredit pada lembaga formal dan banyak pelaku usaha hanya menggantungkan pembiayaan usahanya, yang nantinya akan berdampak pada kinerja dari UMKM tersebut.(Suardana, 2020)

Ada beberapa penyebab atau penghambat terkait kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng selain permasalahan modal yaitu karena literasi keuangan, literasi keuangan merupakan konsep pengetahuan keuangan yang terdiri dari keterampilan, kesadaran dan pemahaman yang berkaitan dengan pengetahuan financial seperti mampu dalam mengelola dan melakukan perencanaan financial dengan baik (Xu dan Zia, 2012). Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, indeks literasi keuangan di Provinsi Bali tahun 2022 sebesar 57,66% sedangkan secara nasional sebesar 49,68% sementara indeks inklusi keuangan di Provinsi Bali sebesar 92,21% sedangkan secara nasional sebesar 85,10%. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding dengan hasil survey pada tahun 2019 yaitu sebesar 76,19%. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan atau inklusi keuangan sebesar 8,91%. Peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras

bersama antara Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian atau lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lain, yang terus berusaha secara berkesinambungan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Tingkat literasi keuangan mencerminkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), keyakinan (*confidence*) yang mempengaruhi sikap (*attitude*), dan perilaku keuangan (*behavior*) seseorang terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan di Lembaga Keuangan formal. Sementara tingkat inklusi keuangan mencerminkan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di Lembaga Keuangan formal. Kota Denpasar memiliki indeks inklusi keuangan sebesar 84,2%, sedangkan Kabupaten Buleleng memiliki indeks inklusi keuangan lebih rendah, yaitu 68,3% (OJK, 2019). Maka dari itu, masih perlu dilakukan peningkatan indeks inklusi keuangan di Kabupaten Buleleng agar tidak terjadi ketimpangan dengan kabupaten/kota lain di Bali. Tidak hanya itu, peningkatan indeks inklusi keuangan juga perlu diprioritaskan kepada usaha mikro untuk meningkatkan kinerja usahanya. (Maharani & Cipta, 2022)

Pertumbuhan UMKM di Kecamatan Buleleng memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Buleleng karena UMKM memiliki kesempatan usaha yang luas yang berada di berbagai sektor ekonomi, tapi para pengusaha UMKM di Kecamatan Buleleng masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka karena terkendala oleh modal. Kesulitan keuangan bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan saja, tetapi kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan seperti kesalahan penggunaan kredit, tidak adanya perencanaan keuangan dan tidak memiliki tabungan (Yanti, 2019, hal. 2) Masalah-masalah tersebut menunjukkan

bahwa inklusi keuangan tidak akan muncul dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan inklusi keuangan memfasilitasi penggunaan produk secara efektif dan membantu pelaku usaha mengembangkan keterampilan dan produk keuangan terbaik sesuai dengan kebutuhan. Inklusi keuangan mampu melakukan perubahan dalam pola berpikir para pelaku ekonomi dalam melihat uang dan keuntungan (Sanistasya, Rahardjo, & Iqbal, 2019, hal. 49).

Inklusi keuangan mampu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM menggunakan layanan keuangan dan mendapatkan dampak langsung dari lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi peningkatan inklusi keuangan pada UMKM maka pada akhirnya akan meningkatkan stabilitas keuangan suatu Negara. Hal ini menjadi penting karena dapat mengoptimalkan sumber dana di daerah yang akan membantu UMKM lebih produktif dan berkembang. Pengelolaan manajemen keuangan memiliki peran dalam menentukan sejauh mana kinerja UMKM (Sanistasya et al., 2019, hal. 50).

Salah satu penyebab rendahnya kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng adalah karena kurangnya akses permodalan. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terhadap keberadaan lembaga keuangan. Inilah yang dikenal dengan sebutan literasi keuangan (Djuwita & Yusuf, 2018, hal. 107). Literasi keuangan bagi UMKM adalah kemampuan pengelola dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, pengelolaan utang dan penyusunan anggaran. Pencatatan Laporan Keuangan, yakni bagaimana kemampuan pengelola UMKM dalam mencatat kegiatan usaha, mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha, mencatat laba dan hal lain terkait dengan kinerja usaha. Sebagian besar bank umum tidak memberikan persetujuan kredit modal, karena UMKM masih belum

dapat menyusun sendiri pelaporan keuangan pada periode tertentu. Keberadaan laporan keuangan UMKM ini sangat penting, agar UMKM dapat mengetahui bagaimana kemajuan dari usaha yang dilakukan. Literasi Pengelolaan Hutang yakni UMKM dapat mendanai modal kerja dan investasinya dengan dua cara. Terdapat dua sumber pendanaan yang utama pada UMKM. Pertama, UMKM dapat menggunakan tabungan. Kedua, dengan cara hutang kepada pihak lain. Disaat sebuah usaha memilih berhutang maka modal pribadi prosentasenya menjadi berkurang dibandingkan dengan modal eksternal/hutang. Literasi Penyusunan Anggaran, dimana hal ini dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan usaha pada masa yang akan datang (Amri & Iramani, 2018, hal. 60). Tingkat literasi keuangan yang tinggi merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan disebabkan dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan seperti kesalahan penggunaan kredit, tidak adanya perencanaan keuangan dan tidak memiliki tabungan. Sehingga memiliki literasi keuangan yang tinggi merupakan hal vital untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera (Akmal & Saputra, 2016, hal. 236). Literasi keuangan mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi keuangan serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang lebih baik bagi pemilik usaha. Kemampuan mengelola keuangan pemilik usaha memang sangat diperlukan untuk kinerja usaha dan kelangsungan usahanya. Pentingnya pemilik usaha memahami pengetahuan keuangan guna memiliki kinerja perusahaan yang lebih bagus. Sehingga memungkinkan UMKM mengalami pertumbuhan bisnis (Kasendah & Wijayangka, 2019, hal. 154).

Inklusi keuangan masuk dalam program literasi keuangan terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku UMKM menggunakan layanan keuangan dan mendapatkan dampak langsung dari lembaga keuangan. Semakin tinggi peningkatan inklusi keuangan pada UMKM maka pada akhirnya akan meningkatkan stabilitas keuangan suatu negara. Hal ini menjadi penting karena mengoptimalkan sumber dana di daerah yang berarti ikut membantu UMKM lebih produktif dan berkembang. Pengelolaan manajemen keuangan memiliki peran dalam menentukan sejauh mana kinerja UKMM. Dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan yang baik maka pelaku usaha mampu menggunakan kemampuan di bidang finansial dalam pengambilan berbagai keputusan. UMKM dengan literasi keuangan yang baik maka akan mampu menerapkan rencana strategis untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, memiliki akses keuangan yang memadai, serta merespon perubahan iklim bisnis yang tidak stabil, sehingga keputusan yang dibuat akan memberikan solusi inovatif dan terarah untuk peningkatan kinerja UMKM (Sanistasya et al., 2019, hal. 50).

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di kecamatan buleleng ditemukan literasi keuangan para pelaku UMKM yang masih tergolong rendah. Hal itu terjadi karena kesadaran masyarakat kurang dalam mengikuti sosialisasi terkait peningkatan literasi keuangan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat kurang mendapatkan pembinaan dalam proses pengelolaan keuangan, khususnya dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan perhitungan yang tepat. Tidak hanya itu, ditemukan pelaku UMKM yang tidak mengetahui kondisi laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaannya, sehingga pelaku UMKM selalu memberikan laporan bahwa perkembangan perusahaan berjalan dengan normal.

Faktanya, pelaku UMKM kurang mengetahui pasti terkait dengan nominal laporan keuangan yang masuk. Menurut Falih et. al (2019), pengelolaan laporan keuangan merupakan hal yang penting diperhatikan untuk menciptakan kesejahteraan dalam mencapai tujuan usaha. Hal tersebut didasari karena kinerja pelaku UMKM yang tergolong rendah.

Pada saat ini teknologi sangat berkembang dengan pesat, tidak hanya di Indonesia tetapi dunia juga merasakan perkembangan teknologi yang setiap waktunya berubah secara signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena teknologi yang setiap harinya berkembang dengan pesat dan telah memasuki di berbagai sektor, salah satunya yaitu pada sektor keuangan. Contohnya yaitu *Financial Technology* yang merupakan teknologi untuk mendukung layanan jasa keuangan. Perkembangan *Financial Technology* banyak memunculkan inovasi aplikasi dalam layanan keuangan seperti alat pembayaran, alat pinjaman dan lain-lain yang mulai terkenal pada masa digital ini (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018, hal. 2).

Istilah *Financial Technology* merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. *Financial Technology* memberikan jasa berupa transaksi keuangan tanpa harus memiliki rekening seperti di perbankan pada umumnya. *Financial Technology* tetap diatur oleh Bank Indonesia meskipun bukan lembaga keuangan seperti perbankan, hal ini bertujuan agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. Bank Indonesia mengatur perusahaan penyelenggara *Financial Technology* untuk wajib mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia menjelaskan *Financial Technology* mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank.

Dalam hal sistem pembayaran, *Financial Technology* berperan dalam; 1) menyediakan pasar bagi pelaku usaha, 2) menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian dan kliring, 3) membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, 4) mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, 5) membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal.

Perkembangan *Financial Technology* menimbulkan creative disruption untuk masyarakat Indonesia yang belum siap menerima perubahan dalam aktivitas ekonomi. Disisi lain, *Financial Technology* memberikan peluang baru bagi ekonomi untuk meningkatkan aktivitas perekonomiannya secara lebih efisien dan efektif *Financial Technology* telah membantu pembiayaan pelaku UMKM yang kurang memiliki akses pada perbankan. Dengan adanya regulasi yang matang mendorong UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan peminjaman transaksi yang mudah melalui *Financial Technology* (Rahardjo, Ikhwan, & Siharis, 2019, hal. 349). *Financial Technology* dengan layanan keuangan seperti Crowdfunding, mobile payments, dan jasa transfer uang yang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup dan mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen oleh karena itu perlu adanya regulasi untuk melindungi tersebut diantaranya dapat perlindungan konsumen, perlindungan dana pengguna potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan maupun force majeure dari kegiatan *Financial Technology* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (Wibowo, 2017, hal. 6)

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Financial Technology* yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari

bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *Financial Technology* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil (Wijayanti, 2018, hal. 3). Otoritas Jasa Keuangan memastikan akan mengawasi bisnis yang dijalani oleh *Financial Technology* dengan sejumlah aturan yang ketat dimana dikeluarkan pada akhir tahun 2016. Satu hal yang nantinya akan dibuat aturan yang jelas adalah terkait penentuan batas modal minimal industri *Financial Technology*. Salah alasan dibuatnya aturan tersebut adalah untuk perlindungan konsumen Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) / *Financial Technology* Peer-to Peer (P2P) Lending resmi diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / tertuang) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Saat ini banyak masyarakat yang beralih ke *Financial Technology* dikarenakan masyarakat sekarang ingin semua berjalan dengan cepat dan mudah, tanpa ada batasan-batasan serta aturan-aturan yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa kenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi serta kemudahan dalam bertransaksi merupakan faktor yang mendukung pelaku UMKM untuk menggunakan *Financial Technology* dan hal-hal yang berkaitan dengan faktor pendukung yaitu berupa kemudahan pencatatan, kemudahan proses transaksi serta meningkatkan penjualan (Sugiarti, Diana, & Mawardi, 2019, hal. 91).

Munculnya inovasi *Financial Technology* memberikan angin segar untuk pelaku bisnis UMKM. *Financial Technology* dapat membantu pelaku bisnis untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan. Pelaku bisnis bisa memanfaatkan *Financial Technology* sebagai jalan untuk pembiayaan perusahaannya. Peran *Financial Technology* tidak hanya sebatas dalam pembiayaan modal usaha tetapi ada juga yang merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital juga pengatur keuangan. Kehadiran layanan *Financial Technology* keuangan berbasis teknologi di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Sugiarti et al., 2019, hal. 91). Kolaborasi *Financial Technology* dengan lembaga keuangan, khususnya dapat meningkatkan keuangan inklusi pada UMKM di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan telah masuk ke semua sektor, salah satunya yaitu sektor keuangan. Maka, dengan masuknya teknologi ke sektor keuangan akan mengubah industri keuangan ke era digital. Implementasi *Financial Technology* pada industri perbankan akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM untuk mengakses produk-produk layanan keuangan yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus datang langsung ke kantor (Muzdalifa et al., 2018, hal. 2).

Finansial teknologi atau disingkat dengan FinTech memiliki manfaat untuk memudahkan urusan finansial secara daring karena lebih cepat dan praktis (Ade Putri et al, 2020). Menilik dari manfaat tersebut, di kecamatan buleleng juga telah berlaku pemanfaatan teknologi dalam membantu perkembangan usaha, namun masih ditemukan juga pelaku UMKM yang kurang paham terhadap penggunaan

teknologi sebagai media dalam melakukan usaha. Hal ini berdampak pada kinerja pelayanan pelaku UMKM kepada konsumen, karena kebutuhan konsumen tidak dapat dipenuhi dengan optimal.

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi. Teori Atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan orang lain. Teori atribusi juga memaparkan serta mencoba untuk mengidentifikasi apa yang menjadi motivasi atau motif seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Selain itu teori atribusi juga menyatakan bahwa tindakan seseorang dapat timbul dari dua faktor, yakni dalam dan luar diri individu itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebab melalui teori ini dapat memberikan penjelasan mengenai faktor dalam dan luar yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM yang dinilai lambat oleh banyak pihak. Adapun yang termasuk faktor dari dalam yang mempengaruhi kinerja dalam penelitian ini adalah literasi keuangan sebab berkaitan dengan pengetahuan serta pemahaman pelaku UMKM. Kinerja UMKM yang dinilai lambat dapat dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Sementara faktor dari luar adalah inklusi keuangan sebab berkaitan dengan lembaga keuangan, dimana inklusi keuangan dikatakan dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan permodalan sehingga dapat meningkatkan kinerja UMKM dan *Financial Technology* sebab berkaitan dengan teknologi yang sedang berkembang yang mana dengan *finanacial technology* dikatakan dapat mempengaruhi kinerja UMKM.

Menilik dari permasalahan diatas peneliti mendapatkan dugaan awal bahwa terdapat pengaruh literasi keuangan dan *Financial Technology* terhadap

peningkatan kinerja UMKM dengan inklusi keuangan sebagai variabel intervening pada UMKM di kecamatan buleleng. Hal ini didasari karena terdapat penelitian dengan masalah serupa yang dilakukan oleh para ahli. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2019) dengan judul “Pengaruh Literasi keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM (Studi kasus pada UMKM Provinsi DKI Jakarta). Pada penelitian ini, ditemukan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM Provinsi DKI Jakarta. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurvenia Abdullah (2021), dengan judul “Pengaruh *Financial Technology* Terhadap Pendapatan UMKM di Desa Landungsari Kecamatan Dau, Kecamatan Malang”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh *Financial Technology* secara signifikan terhadap Pendapatan UMKM di Desa tersebut.

Berdasarkan dugaan awal peneliti dan referensi dari penelitian sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan variabel penelitian yang sama namun dengan jumlah variabel yang berbeda dengan objek penelitian yang berbeda pula sebagai pembaharuan dari penelitian sebelumnya. Hal ini akan dikaji dalam penelitian dengan judul, **“Pengaruh Literasi Keuangan dan *Financial Technology* Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM Dengan Inklusi Keuangan Sebagai Variabel Intervening pada UMKM di Kecamatan Buleleng.”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan jasa keuangan yang mengakibatkan rendahnya tingkat literasi keuangan. Tingkat literasi yang rendah membuat masyarakat kurang memahami bagaimana mengelola

keuangan dengan baik sehingga berakibat pada kinerja UMKM itu sendiri karena biasanya pelaku usaha tidak memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha.

2. Pencapaian inklusi keuangan yang baik namun literasi keuangan yang tidak baik. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang mengakses dan mampu menggunakan jasa layanan keuangan namun dalam pemahaman atau pengetahuan terhadap layanan tersebut masyarakat masih kurang memahami.
3. Upaya yang akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan adalah dengan memunculkan layanan digital yang disebut *Financial Technology*.
4. Apakah penggunaan *Financial Technology* sudah mampu untuk mendukung pencapaian literasi keuangan sehingga mampu meningkatkan inklusi keuangan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka dibuat batasan masalah, yaitu bagaimana peran literasi keuangan dan *Financial Technology* yang telah digunakan oleh masyarakat terhadap upaya peningkatan kinerja UMKM melalui pencapaian inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya pada batasan masalah diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng?

2. Apakah ada pengaruh *Financial Technology* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng?
3. Apakah ada pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng melalui inklusi keuangan?
4. Apakah ada pengaruh *Financial Technology* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng melalui inklusi keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Technology* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM yang dimediasi oleh inklusi keuangan di Kecamatan Buleleng
4. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Technology* terhadap kinerja UMKM yang dimediasi oleh inklusi keuangan di Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam layanan perbankan dan keuangan digital yang dimana merupakan bagian dari inklusi keuangan. Serta dampaknya bagi masyarakat yaitu pelaku UMKM dalam meningkatkan kinerja.

- b. Bagi Mahasiswa, melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis. Serta sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan literatur untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah bagi peningkatan kinerja UMKM dengan memanfaatkan *Financial Technology* dan literasi keuangan untuk mencapai inklusi keuangan pada pelaku UMKM Kecamatan Buleleng.
- b. Penelitian ini bertujuan sebagai masukan dan acuan untuk melanjutkan penelitian di masa yang akan datang
- c. Penelitian ini memberikan tambahan informasi bagi masyarakat untuk mendukung kinerja usaha kecil masyarakat di Kecamatan Buleleng melalui program peningkatan literasi keuangan, penerapan *Financial Technology* bagi pelaku UMKM sehingga tercapai inklusi keuangan secara maksimal pada UMKM di Kecamatan Buleleng.